

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Anang Shopan Tornadi dan Muhammad Hendri Nova, *Praperadilan dan Hakim Tunggal*, Borneo Development Project Bajarmasin, 2020.
- Apriyanto Nusa dan Ramadhan Kasim, *Hukum Acara Pidana, Teori, Asas Dan Perkembangannya Pasca Putusan Konstitusi*, Setara Press, Malang, 2019.
- Dio Wicaksono, dkk, *Penelitian Format Putusan Pengadilan Indonesia: Studi Empat Lingkungan Peradilan Di Bawah Mahkamah Agung*, Badan Penerbit FHUI, Jakarta, 2020.
- Jaholden, *Praperadilan Dan Pembaharuan Hukum Pidana*, AA Rizky, Serang, 2021.
- John Rawls, *Theory of Justice*, Harvard University Press, United States of America, 1999.
- Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2015.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020.
- Ridwan Mansyur, et al, *Kompilasi Penerapan Hukum oleh Hakim dan Strategi Pemberantasan Korupsi*, Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2016.
- Sertlika Aprita dan Rio Adhitya, *Filsafat Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2020.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2009.

Suyanto, *Hukum Acara Pidana*, Zifatama Jawara, Sidoarjo, 2018.

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Yulia, *Hukum Acara Perdata*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2018.

Amin, R., Manalu, I., Van Hemert, W. A., & Al Aziz, M. F. (2022). Penyelesaian Ganti Kerugian Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Penetapan Praperadilan: Studi Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. *Jurnal Hukum Sasana*, 8(1), 19-32.

Djanggih, H., & Saefudin, Y. (2017). Pertimbangan Hakim Pada Putusan Praperadilan: Studi Putusan Nomor: 09/PID. PRA/2016/PN. Lwk Tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Politik Uang. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(3), 413-425.

Ihsani, A. N. (2017). Urgensi Perluasan Objek Praperadilan Dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Hak Asasi Tersangka. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 66-85.

Muntaha, M. (2017). Pengaturan Praperadilan dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 29(3), 461-473.

Sitoresmi, A. S. (2019). Sanksi Aparat Penegak Hukum Yang Melanggar Kuhap Dalam Menanggulangi Kejahatan. *Jurnal Jurisprudence*, 8(2), 68-73.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2022/Pn.Mtr

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Mas Hushendar, Tuntutan Ganti Kerugian Dalam Perkara Praperadilan,

<https://badilum.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/2990-tuntutan-ganti-kerugian-dalam-perkara-praperadilan.html> , diakses pada 20 Desember 2022.

Stefanus Anto, “LBH: Kasus Salah Tangkap Berulang”,
<https://www.kompas.id/baca/metro/2022/03/07/lbh-kasus-salah-tangkap-berulang>, diakses pada 12 November 2022.